

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Good Governance, dan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon

Nita Sapitri

nitasapitri@mail.syekhnrjati.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan Bypass Sunyaragi, Kec. Kesambi Kab. Cirebon, Jawa Barat

ABSTRACT

This research aims to determine whether the implementation of governance accepted accounting principles (GAAP), good governance, and the quality of government apparatus performance significantly influence the quality of finance report at the Cirebon Regency Trade and Industry Office. The method used in this research is causal associative with a quantitative approach. The data collection technique involved the distribution of questionnaires and observations of 57 government officials at the Trade and Industry Office of Cirebon Regency, who served as the sample for this study. Purposive sampling is the technique used in this study, with the aim of determining the sample size. The data analysis techniques used in this research are multiple linear regression, t-test, f-test, and the coefficient of determination using the evIEWS 12 application. The results of the partial data test in this study show that the implementation of governance accepted accounting principles (GAAP) has a probability value of 0.9419 and it is known that good governance has a probability value of 0.8524, indicating that the implementation of governance accepted accounting principles (GAAP) and good governance affect the quality of financial reports. Meanwhile, the quality of government apparatus performance does not affect the quality of financial reports, with a probability value of 0.0003. However, simultaneously, the implementation of governance accepted accounting principles (GAAP), good governance, and the quality of apparatus performance have a collectively significant impact on the quality of financial reports.

Keywords: *Governance accepted accounting principles (GAAP), good governance, performance quality, financial statement quality.*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), good governance dan kualitas kinerja aparatur pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner dan observasi kepada 57 aparatur pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang berperan sebagai sampel pada penelitian ini. Purposive sampling menjadi teknik yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menentukan jumlah sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi evIEWS 12. Hasil uji data secara parsial dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) memiliki nilai probabilitas

0,9419 dan diketahui bahwa *good governance* memiliki nilai probabilitas 0,8524, hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk kualitas kinerja aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai probabilitas 0,0003. Namun secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), *good governance*, dan kualitas kinerja aparatur memiliki hasil yang berpengaruh secara bersamaan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Standar akuntansi pemerintah (SAP), *good governance*, kualitas kinerja, kualitas laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya perkembangan zaman maka adanya perubahan yang kian meningkat, termasuk dunia akuntansi, terutama akuntansi pada sektor publik atau pemerintah yang kian zaman akan adanya perubahan serta perbaikan untuk peningkatan menjadi lebih baik lagi. Dan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya bentuk tanggungjawab dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai kewajiban pemerintah agar semua hak terpenuhi adalah dengan adanya keuangan yang diolah dengan baik. Dan telah diketahui bahwa kewajiban pemerintah dalam mengolah keuangan dengan transparan, akuntabel serta sesuai dengan pedoman dan undang-undang yang berlaku (Rachmawati & Anik, 2020).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan serta meningkatkan suatu instansi, dibutuhkan prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan. Prinsip tersebut biasa disebut dengan *Good Governance*. *Good Governance* sangat wajib untuk diimplementasikan dalam instansi pemerintahan di Indonesia, karena dengan adanya *good governance* yang tertanam dalam diri aparatur pemerintahan, maka suatu instansi pemerintahan akan mampu mengelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas (Maisyaroh & Haryanto, 2023). Banyak dari hasil peneliti terdahulu yang mengungkapkan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh yang terikat dengan laporan keuangan. Namun selain *Good Governance* yang menjadi pengaruh terhadap laporan keuangan, kualitas kinerja juga menjadi pokok penyebab sebuah timbulnya kualitas dari laporan keuangan yang benar sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (R. P. Sari et al., 2023).

Kualitas kinerja dari aparatur pemerintahan sangat penting untuk ditingkatkan dan dijaga keprofesionalitasnya dalam memenuhi tanggungjawab serta tugasnya. Aparatur pemerintahan mempunyai peran yang amat penting, karena aparatur pemerintah menjadi pemeran atau pelaku yang membangun terciptanya sebuah kualitas laporan keuangan yang baik dan benar, serta pelaku yang harus menerapkan pedoman serta prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *Good Governance* dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya (R. P. Sari et al., 2023). Untuk dapat mewujudkan laporan keuangan yang mempunyai nilai tinggi serta berkualitas dalam suatu instansi pemerintahan maka berkaitan dengan sumber daya aparatur serta kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas juga. Kualitas aparatur pemerintahan menjadi hal yang diperhatikan karena dengan hasil kinerja aparatur pemerintahan itulah sebuah instansi akan memperoleh kualitas yang baik (Rachmawati & Anik, 2020).

Sudah menjadi persoalan masalah umum terkait penataan personil aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan tata tertib yang tertuang dalam hukum serta pedoman dan prinsip yang berlaku. Seringkali aparatur menyalahgunakan jabatan demi

memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga menjadi penyebab turunnya kualitas tingkat suatu instansi pemerintahan. Hal itu juga yang dapat menyebabkan turunnya kualitas sebuah laporan keuangan, karena menyalahgunakan keuangan instansi untuk masalah pribadi serta akan timbul hilangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan instansi pemerintah (Rachmawati & Anik, 2020).

Telah tercantum didalam UU pemerintah No.71 tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengartikan bahwa laporan keuangan adalah sebuah posisi serta transaksi keuangan yang dilaporkan secara tertata dengan rapih dan tersusun. Adanya laporan keuangan sendiri mempunyai kegunaan serta manfaat yang penting dalam sebuah lembaga, instansi maupun organisasi untuk terwujudnya transparansi serta akuntabilitas terkait keuangan yang telah dilakukan didalamnya. Dalam sebuah laporan keuangan didalam pemerintahan harus mampu memberikan informasi yang mengandung manfaat bagi pengguna informasi tersebut dan bertujuan untuk mendapatkan penilaian terkait akuntabilitas dan transparansi keuangan didalamnya yang akan memudahkan pengguna untuk memperoleh keputusan dalam mengambil langkah selanjutnya. Laporan keuangan yang memiliki nilai kualitas tinggi yaitu laporan keuangan yang mampu memenuhi karakteristik secara kualitatif, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami maknanya (Ramadhani & Abdul, 2020).

Sebuah kualitas laporan keuangan menjadi hal yang harus diwujudkan oleh instansi pemerintahan dengan memperhatikan pedoman serta aturan yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikelola oleh aparatur pemerintah dengan memiliki kualitas kinerja yang baik sesuai dengan prinsip dalam *Good Governance* untuk mendapatkan tercapainya sebuah tujuan serta meningkatkan kualitas instansi melalui kualitas dalam pelaporan keuangan didalamnya (Luh et al., 2020). Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), *good governance* dan kualitas kinerja aparatur pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

TINJAUAN PUSTAKA

1. TEORI

a. Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi dalam pemerintahan harus mempunyai standar sebagai landasan sebuah hukum dalam menyusun laporan keuangan yang baik, standar tersebut disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain menjadi sebuah landasan hukum, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga merupakan sebuah pedoman serta prinsip yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh aparatur pemerintahan sebuah instansi baik pusat maupun daerah dalam membuat atau menyusun laporan terkait keuangan untuk dapat mencapai sebuah tujuan dan meningkatkan pelaporan yang akuntabilitas serta transparan sebagai media informasi yang disampaikan kepada pihak yang berkaitan maupun masyarakat (Luh et al., 2020).

Pengertian dari akuntansi pemerintah tidak lepas dengan pengertian dari akuntansi pada umumnya, yaitu mencatat transaksi, namun yang membedakan akuntansi pemerintah dengan akuntansi pada umumnya yaitu dalam kaitannya dengan pemerintahan. Akuntansi pemerintah adalah perhitungan serta pencatatan suatu transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan (Pramesti AP, n.d.2020).

b. *Good Governance*

Kepemerintahan yang dianggap baik atau disebut dengan *good governance* adalah suatu konsep yang sifatnya kolektif, hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitannya

antara semua tindakan ataupun tingkah laku dengan arahan, pengendalian, dan pengaruh masalah pemerintahan untuk dapat menciptakan nilai yang baik dalam bertanggungjawab terkait pemerintahan (Nurhidayat, 2023).

Good Governance adalah salah satu prinsip atau konsep pendekatan yang harus diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan selain komitmen yang telah ditetapkan dalam instansi pemerintahan. Selain itu, menurut lembaga administrasi negara, *Good Governance* merupakan sebuah bentuk tanggungjawab dan keefektifan untuk menjaga hubungan yang baik antar petinggi negara serta masyarakat yang telah dibentuk dan diselenggarakan oleh pemerintah suatu negara (Pramesti AP, n.d.2020).

c. Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Kualitas kinerja aparatur dalam sebuah instansi pemerintahan merupakan hal yang harus diutamakan agar sebuah instansi bisa mewujudkan tujuan yang ingin digapainya serta bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi tersebut. Kualitas kinerja aparatur merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang aparatur yang mampu memenuhi tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kualitas aparatur tersebut dapat dilihat dari keterampilan serta kinerjanya dalam menyelesaikan kerjaan atau tugasnya (Jundia et al., 2023).

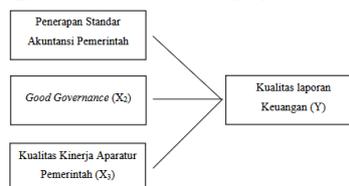
d. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah merupakan cerminan dari kualitas sebuah instansi pemerintahan, karena dari laporan keuangan tersebut menjadikan sebuah indikator untuk dapat melihat antara sehat atau tidaknya sebuah instansi pemerintahan. Instansi pemerintah dikatakan sehat apabila instansi tersebut memiliki laporan keuangan yang berkualitas tanpa adanya keganjilan didalamnya (Ratnasari et al., 2024).

Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada tahun 2020 mengenai apa itu laporan keuangan. Dan pengertian tersebut menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah sebuah laporan yang telah disusun secara tertib dan rapih secara terstruktur terkait bagaimana posisi keuangan yang baik serta bagaimana cara menyusun laporan transaksi yang telah dilakukan atau telah terjadi oleh pelaku dalam sebuah lembaga atau instansi ataupun organisasi (Luh et al., 2020). Adapun kegunaan dari laporan keuangan yaitu sebuah informasi terkait keuangan itu sendiri, dimulai dari bagaimana posisinya, anggaran, kas, serta apakah perlu adanya perubahan dalam ekuitas atau tidak. Hal tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparan dari pelaporan keuangan sebuah lembaga atau instansi dan kemudian untuk bisa mengambil sebuah keputusan setelah melakukan evaluasi yang telah diperoleh setelah berhasil menyusun sebuah laporan keuangan yang baik sesuai dengan pedoman (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka berfikir tersaji pada Gambar sebagai berikut:



Keterangan:

X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

X2 : *Good Governance*

X3 : Kualitas kinerja aparatur pemerintah

Y : Kualitas laporan keuangan

Berdasar kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), *good governance* serta kualitas kinerja aparatur pemerintah dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu, kualitas laporan keuangan. Berikut merupakan keterkaitan antar variabel, yaitu:

- 1) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi pedoman dalam penyusunan sebuah laporan keuangan dan merupakan jembatan penghubung atau media yang digunakan pada instansi pemerintahan sebagai bentuk tanggungjawaban atas keuangan suatu instansi kepada masyarakat umum maupun yang memiliki kepentingan dengan instansi pemerintah tersebut (Rachmawati & Anik, 2020). Standar akuntansi pada pemerintahan mempunyai kaitan yang begitu kuat terhadap laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan landasan dasar dari instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa mewujudkan sebuah laporan keuangan yang tertata dan rapih (Maisyaroh & Haryanto, 2023).

X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

- 2) Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Good governance* adalah suatu hal prinsip yang menjadi acuan terciptanya laporan keuangan yang akuntabilitas serta transparansi yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tanggungjawabnya terkait pelaporan keuangan, agar terciptanya serta tercapainya sebuah tujuan dengan baik untuk meningkatkan dan menciptakan keberhasilan masyarakat. Dan adanya penerapan *good governance* menjadi sebuah kebutuhan yang diinginkan masyarakat untuk bisa meningkatkan kinerja dari lembaga pemerintah, agar pemerintah bisa dengan cepat melayani serta mendengarkan kepentingan masyarakat melalui aturan yang berlaku. (Pramesti AP, n.d.2020). Dalam penelitian (Rachmawati & Anik, 2020) menyatakan hasil penelitiannya, bahwa *good governance* memiliki pengaruh terhadap terciptanya kualitas sebuah laporan keuangan. Dan terdapat dukungan dalam penelitiannya oleh Oktarina,dkk (2016) yang mengungkapkan hasil dalam penelitiannya bahwa penerapan *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sebuah laporan keuangan.

X2 : Good Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

- 3) Pengaruh Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dalam sebuah lembaga instansi ataupun organisasi suatu pemerintah mempunyai sebuah tujuan untuk dicapai, untuk bisa mencapai sebuah tujuan tentu tidak lepas dari adanya kinerja aparatur pemerintah didalamnya. Seorang aparatur pemerintah atau pegawai negeri sipil menjadi sebagai peran atau pelaku utama untuk menjalankan suatu instansi pemerintahan, namun seorang aparatur pemerintah harus profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya. Aparatur pemerintah yang profesional akan memenuhi tanggungjawabnya dengan menerapkan aturan atau pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku (Ramadhani & Abdul, 2020). Aparatur pemerintah akan memiliki potensi yang baik apabila menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Menyusun laporan keuangannya dalam lembaga instansi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2022) yang menyatakan bahwa kualitas kinerja atau sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan

dalam penelitiannya didukung oleh hasil penelitian dari Daniel, dkk (2013) yang mengatakan bahwa kualitas aparatur sebuah pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

X3: Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang akan diteliti, karena jawaban tersebut belum berdasarkan fakta yang didapatkan melalui pengumpulan data atas pernyataan (Nasution, 2020), maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ha: Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Ho: Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Ha: Penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Ho: Penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Ha: Kualitas kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Ho: Kualitas kinerja aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang didalamnya terdapat banyaknya angka dan angka tersebut terdiri dari pengumpulan data maupun pengumpulan serta hasil (Maisyaroh & Haryanto, 2023). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dengan jumlah 103 aparatur pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti memiliki jumlah sampel atau responden 57 aparatur, dengan menggunakan beberapa eliminasi karakteristik. Data primer merupakan data penelitian yang didapat dari pengumpulan langsung oleh peneliti. Data yang telah didapatkan adalah hasil data dari angket melalui sistem kuesioner, survei serta observasi serta lainnya, yang dilakukan secara langsung.

Definisi Operasional: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdiri dari basis akuntansi, penyajian dalam bentuk wajar, konsisten, mempunyai nilai historis, substansi melebihi bentuk formal, merealisasikan, kelengkapan yang dipublikasikan, dan periodisitas. *Good governance*: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Kualitas kinerja aparatur pemerintah: kualitas kinerja, ketetapan, inisiatif, dan komunikasi. Kualitas Laporan Keuangan: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

PEMBAHASAN

1. Rekapulasi data aparatur dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon mendapatkan dukungan berupa sumber daya

manusia yang berjumlah 103 aparatur, berikut data aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan tabel seperti:

a. Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan

Jumlah aparatur pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon dapat diuraikan berdasarkan pendidikannya, seperti berikut:

Tabel
Jumlah Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Menurut Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		PNS	PPPK	Tenaga Kerja Kontrak
1	Pasca Sarjana (S-2)	7	-	2
2	Sarjana (S-1)	29	2	13
3	D4	-	-	1
4	D-3	3	-	-
5	D-1	-	-	-
6	SLTA	16	-	26
7	SMP	1	-	1
8	SD	1	-	1
	JUMLAH	57	2	44

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon diolah 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon berpendidikan terakhir SLTA/SMA kebanyakan ialah tenaga kerja teknis lapangan di Pasar. Sedangkan untuk SDM di Dinas mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

b. Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang

Jumlah aparatur pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon dapat diuraikan berdasarkan golongan ruangnya, seperti berikut:

Tabel
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Esselonering	Jumlah (Orang)
1	I/d	1
	II/a	1
	II/b	1
	II/c	7
	II/d	4
2	III/a	17
3	III/b	5
	III/c	6
	III/d	11
3	IV/a	5
	IV/c	1

4	Fungsional terdiri dari : 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 3. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda 4. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama 5. Analis Perdagangan Ahli Muda 6. Analis Perdagangan Ahli Pertama 7. Perencana Ahli Muda 8. Pembina Industri Ahli Pertama 9. Penera Ahli Muda 10. Penera Ahli Pertama 11. Penera Terampil 12. Pengamat Tera Terampil	2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2
5	Pelaksana	25
JUMLAH		103

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon diolah 2024)

Berdasarkan table 4.2 diatas terdapat jumlah aparatur berdasarkan golongan ruang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan golongan I/d seorang aparatur, II/a seorang aparatur, II/b seorang aparatur, golongan II/c sebanyak 7 orang aparatur, II/d sebanyak 4 orang aparatur, III/a sebanyak 17 orang aparatur, III/b sebanyak 5 orang aparatur, III/c sebanyak 6 orang aparatur, III/d sebanyak 11 orang aparatur, IV/a 5 orang aparatur, IV/c terdapat seorang aparatur dan golongan fungsional terdapat 19 orang aparatur serta pelaksana terdapat 25 orang aparatur.

c. Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah aparatur pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, seperti berikut:

Tabel
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah Aparatur	Jenis Kelamin	
			P	L
1	Golongan 1/a	-	29	74
	Golongan 1/b	-		
	Golongan 1/c	-		
	Golongan 1/d	1		
2	Golongan II/a	1		
	Golongan II/b	1		
	Golongan II/c	7		
	Golongan II/d	4		
3	Golongan III/a	17		
	Golongan III/b	5		
	Golongan III/c	6		

	Golongan III/d	11		
4	Golongan IV/a	5		
	Golongan IV/b	-		
	Golongan IV/c	1		
	Golongan IV/d	-		
5	Fungsional	19		
6	Pelaksana	25		
Jumlah		103		

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon diolah 2024)

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 74 aparatur berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 29 aparatur yang berjenis kelamin perempuan.

2. Gambaran umum responden

Dalam mempermudah penelitian yang berkaitan dengan proses dari analisis data, peneliti mengurai data dari responden yang memenuhi kriteria dalam metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik purposive sampling dari populasi 103 aparatur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, dan terdapat sampel 57 aparatur yang memenuhi kriteria dalam pengambilan data yang dibutuhkan. Berikut data responden dari 57 aparatur yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah data responden berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon:

Tabel

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	41	72%
2.	Perempuan	16	28%
Jumlah		57	100%

(Sumber: Data Primer, 2024)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 57 responden merupakan aparatur pada Dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon. 57 aparatur tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini dan didapatkan hasil bahwa sebanyak 41 aparatur atau dapat dipresentasikan menjadi 72% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 16 aparatur atau dipresentasikan menjadi 28% yang berjenis kelamin perempuan.

b. Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah data responden berdasarkan usia kelamin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon:

Tabel

Data Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1.	< 30	7	12%
2.	31-40	8	14%
3.	41-50	33	58%
4.	51-60	9	16%

Jumlah	57	100%
---------------	-----------	-------------

(Sumber: Data Primer, 2024)

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, didapatkan dari 57 responden yang merupakan aparatur pada Dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon. 57 aparatur tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini dan menyatakan bahwa terdapat aparatur yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 7 aparatur atau sebanyak 12%, aparatur yang berusia 31-40 tahun sebanyak 8 aparatur atau 14%, aparatur yang berusia 41-50 tahun sebanyak 33 aparatur atau sebanyak 58% dan 9 aparatur atau 16% merupakan jumlah aparatur yang berusia 51-60 tahun.

c. Latar belakang Pendidikan

Berikut merupakan data jumlah responden aparatur pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon dapat diuraikan berdasarkan latar belakang pendidikannya, seperti berikut:

Tabel
Data Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	S2	9	16%
2.	S1	44	78%
3.	D4	1	1%
4.	D3	3	5%
5.	D2	-	-
6.	D1	-	-
Jumlah		57	100%

(Sumber: Data Primer, 2024)

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 57 responden merupakan aparatur pada Dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon. 57 aparatur tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini dan didapatkan hasil bahwa sebanyak 9 atau 16% aparatur berlatar belakang Pendidikan strata 2 atau S2, sebanyak 44 atau 78% aparatur berlatar belakang strata 1 atau S1, sebanyak 1 atau dipresentasikan 1% aparatur yang berlatar belakang Pendidikan diploma 4 atau D4, dan sebanyak 3 atau dengan presentase 5% aparatur yang memiliki latar belakang Pendidikan diploma 3 atau D3.

d. Lama bekerja

Berikut merupakan data jumlah responden aparatur pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon dapat diuraikan berdasarkan durasi lamanya bekerja, seperti berikut:

Tabel 4.7
Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Frekuensi	Presentase
1.	< 5 Tahun	7	12%
2.	6-10 Tahun	5	9%
3.	11-15 Tahun	5	9%
4.	16-20 Tahun	8	14%
5.	> 20 Tahun	32	56%
Jumlah		57	100%

(Sumber: Data Primer, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa aparatur yang menjadi sampel pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon dengan durasi lamanya aparatur bekerja yaitu terdapat 7 aparatur atau setara dengan 12% yang memiliki riwayat lamanya bekerja selama kurang dari 5 tahun, 5 aparatur atau dengan presentase 9% yang telah lama bekerja selama 6-10 tahun, , 5 aparatur atau dengan presentase 9% yang telah lama bekerja selama 11-15 tahun, , 8 aparatur atau dengan presentase 14% yang telah lama bekerja selama 16-20 tahun dan , 32 aparatur atau dengan presentase 56% yang telah lama bekerja selama lebih dari 20 tahun.

A. Hasil Uji Data Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

(Ghozali 2019) Menurutnya bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa maksud untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Metode ini mencakup standar deviasi, nilai rata-rata, varians, dan rentang statistik untuk memberikan gambaran keseluruhan dari sampel yang dikumpulkan.

Berikut merupakan tabel untuk mengetahui hasil dari analisis deskriptif dengan sampel 57 aparatur pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

**Tabel
Analisis Statistik Deskriptif**

	X1	X2	X3	Y
Mean	47.21429	49.21429	45.35714	49.69643
Median	47.00000	49.00000	45.50000	50.00000
Maximum	50.00000	50.00000	49.00000	50.00000
Minimum	45.00000	47.00000	44.00000	48.00000
Strd.Dev,	1.626086	0.779610	1.102535	0.501621
Skewness	0.289980	-0.621075	0.490290	-1.283425
Kurtosis	1.878799	2.627000	3.392121	3.552641
Jarque-Bera	3.718040	3.924815	2.602361	16.08630
Probability	0.155825	0.140520	0.272210	0.000321
Sum	2644.000	2756.000	2540.000	2783.000
Sum Sq.Dev	145.4286	33.42857	66.85714	13.83929
Observations	56	56	56	56

(Sumber: Data Primer 2024)

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan sebuah aplikasi evIEWS 12 telah diperoleh secara bersamaan dan tidak menggunakan uji validitas pada setiap variabel dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1), Good Governance (X2), Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Cara untuk dapat mendapatkan hasil seberapa besar r tabel dalam penelitian ini, yaitu

dengan menggunakan rumus $df = n-2$ dan dengan tingkat taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ atau jika dipresentasikan sebesar 5%, diketahui bahwa n merupakan jumlah responden. Maka didapatkan hasil r_{tabel} yaitu, $df = 57-2 = 55$ serta perolehan r_{tabel} yaitu 0,220. Berikut merupakan tabel hasil dari uji validitas dengan menggunakan aplikasi eviews 12 :

Tabel Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1), Good Governance (X2), Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah (X3)

Item	rhitung	r _{tabel}	Keterangan
X1	0,766	0,220	Valid
X2	0,669	0,220	Valid
X3	0,627	0,220	Valid
Y	0,254	0,220	Valid

(Sumber: Data Primer 2024)

Berdasarkan tabel 4.9 yang merupakan hasil uji validitas dari keseluruhan variabel dalam penelitian. Hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 40 item pernyataan kuisioner dengan masing-masing setiap variabelnya terdiri dari 10 item pernyataan kuisioner dan 40 item pernyataan kuisioner tersebut merupakan keseluruhan dari variabel X1, X2, X3, dan Y dapat dinyatakan valid, karena memperoleh nilai rhitung lebih besar dari r_{tabel}.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dengan aplikasi eviews 12 memperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1,X2,X3

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	2,64	0,60	Reliabel
2.	Good Governance	0,78	0,60	Reliabel
3.	Kinerja Aparatur Pemerintah	1,21	0,60	Reliabel
4.	Kualitas Laporan Keuangan	2,25	0,60	Reliabel

(Sumber: Data Primer 2024)

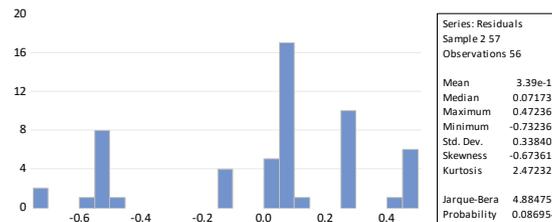
Berdasarkan tabel 4.10 diatas dengan menggunakan aplikasi eviews 12, diperoleh nilai cronbach's alpha reliabilitas instrument dari seluruh variabel dalam penelitian menunjukkan nilai yang reliabel. Hal tersebut disebabkan oleh nilai cronbach's alpha dari seluruh variabel penelitian memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Apabila nilai signifikan (Asymp.Sig) lebih besar dari 0,05 maka distribusi variabelnya normal, akan tetapi apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi variabelnya tidak normal(Wulandari & Efendi, 2022)

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas



(Sumber: Data Primer 2024)

Berdasar tabel 4.11 yang menunjukkan hasil uji normalitas pada penelitian ini. Hasil pada tabel tersebut memiliki nilai probability 0,086 lebih besar dari 0,05 dan didistribusikan variabel pada penelitian ini normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	12.45109	5203.073	NA
X1	0.001182	1102.695	1.283112
X2	0.005673	5743.234	1.415132
X3	0.002397	2061.623	1.195710

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa VIF variabel X1 sebesar $1,283112 < 10$, nilai VIF variabel X2 sebesar $1,415132 < 10$ dan nilai VIF variabel X3 sebesar $1,195710 < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

c. Uji Heterostatistik

Tabel 4.13 Uji Heterostatistik

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.343456	Prob. F(3,53)	0.0835
Obs*R-squared	6.675470	Prob. Chi-Square(3)	0.0830
Scaled explained SS	4.955691	Prob. Chi-Square(3)	0.1751

Hasil uji heteroskedastisitas glejser menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared Prob.Chi-Square sebesar 0,0830. Maka dapat disimpulkan bahwa x1, x2 dan x3 memiliki nilai sebesar $0,0830 > 0,05$ yang artinya tidak memiliki gejala heteroskedastisitas atau dikatakan juga dengan lolos uji.

d. Uji Linearitas

Tabel 4.14 Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Omitted Variables: Squares of fitted values
Specification: Y C X1 X2 X3

	Value	df	Probability
t-statistic	1.101231	51	0.2760
F-statistic	1.212710	(1, 51)	0.2760
Likelihood ratio	1.316018	1	0.2513

Hasil uji linearitas diatas menunjukkan hasil F-statistic Probability sebesar $0,2760 > 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut memenuhi uji linearitas karena memiliki nilai lebih dari 0,05.

e. Uji Autokolerasi

Tabel 4.15 Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.651332	Prob. F(2,45)	0.0816
Obs*R-squared	5.903250	Prob. Chi-Square(2)	0.0523

Hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa nilai Prob.Chi-Square (2) sebesar $0,0523 > 0,05$, maka tidak ada masalah autokorelasi atau lolos uji autokorelasi.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel Regresi Linear Berganda

Sample: 1 57
Included observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.05429	6.097021	8.701675	0.0000
X1	0.188770	0.105767	1.178476	0.0179
X2	-0.028464	0.092926	-0.306308	0.7606
X3	0.143388	0.063123	2.271584	0.0272

$$Y = 53.05429 + 0.188770 * X1 - 0.028464 * X2 + 0.117552110815 * X3$$

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Tabel 4.17 Uji Parsial (t)

Sample: 1 57
Included observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.05429	6.097021	8.701675	0.0000
X1	0.188770	0.105767	1.178476	0.0179
X2	-0.028464	0.092926	-0.306308	0.7606
X3	0.143388	0.063123	2.271584	0.0272

b. Uji Simultan (f)

Tabel 4.18 Uji Simultan (f)

R-squared	0.544887
Adjusted R-squared	0.467420
S.E. of regression	0.366073
Sum squared resid	6.298446
Log likelihood	-18.27919
F-statistic	7.033868
Prob(F-statistic)	0.000005

Dari tabel diatas diketahui nilai F-statistic sebesar 7,033 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000005 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen X berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel Y.

6. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.544887
Adjusted R-squared	0.467420
S.E. of regression	0.366073
Sum squared resid	6.298446
Log likelihood	-18.27919
F-statistic	7.033868
Prob(F-statistic)	0.000005

Didapatkan hasil dari dari tabel diatas yaitu nilai Adjusted R Squared sebesar 0,468 artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 46,8%. Sedangkan sisanya sebesar 53,2%.

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh dengan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (H_1 diterima dan H_0 ditolak). Hal tersebut menandakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) mempunyai peran yang amat penting terkait penyusunan laporan keuangan yang berkualitas bagi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Adanya sebuah pedoman standar akuntansi pemerintah (SAP) oleh pemerintahan dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang memiliki nilai kualitas tinggi. Sebagaimana dengan yang telah diatur dan dijelaskan dalam UU No.17 tahun 2003 terkait keuangan suatu negara serta UU No.23 tahun 2004 terkait bentuk pertanggungjawaban suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah yaitu dengan membuat dan memberikan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang memiliki hasil serupa oleh Yanti & Made (2020), (P. R. Ramadhan, 2019), (Suprihatin & Ananthi, 2019), (Ariyanto, 2020), (Hidayat et al., 2021), (Lantu et al., 2023). Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Aprsiansyah & Rahayu, 2020), (Susliyanti & Binawati, 2020), dan (Mahartini et al., 2021), yang menjelaskan bahwa dari lingkungan, atau kondisi yang berbeda, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kualitas laporan keuangan, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tidak cukup dengan hanya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, tetapi perlu memperkuat sistem akuntansi keseluruhan. Menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintahan saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. Penerapan Standar Akuntansi harus didukung oleh pelatihan yang memadai, infrastruktur yang memadai, dukungan manajemen, dan perubahan dalam budaya organisasi, tanpa adanya komitmen, dan upaya yang serius untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan benar, standar akuntansi ini tidak akan memberikan dampak yang bisa diharapkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. **Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh dengan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (H_1 diterima dan H_0 ditolak). Hal tersebut menandakan bahwa *good governance* mempunyai peran yang amat penting terkait penyusunan laporan keuangan yang berkualitas bagi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. *Good Governance* merupakan pedoman untuk mencapai tujuan serta meningkatkan suatu instansi, dibutuhkan prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan. Prinsip tersebut seperti adanya keadilan, akuntabilitas, serta responsivitas yang tertuang dalam *Good Governance*, sebagai landasan atau pedoman yang kemudian diidentifikasi serta dilaksanakan suatu pemerintahan negara.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang memiliki hasil serupa oleh (Luh et al., 2020), (R. P. Sari et al., 2023), (Jundia et al., 2023), (Zai et al., 2020), (Alqooti, 2020), (Rahmadani, 2022) namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anik, 2020), (Sari F, 2022), (Patty, 2019), (Ardianti E, 2019), dari hasil penelitian terdapat hal yang menyebabkan penerapan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul yaitu beberapa dinas di kabupaten Gunungkidul belum menerapkan prinsip-prinsip dan praktik *good governance*. Beberapa dinas belum pernah mengadakan CSR (Corporate Social Responsibility) dan kurang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dinas diluar kegiatan yang bersifat pemerintahan.

3. **Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas kinerja aparatur pemerintah tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (H_1 ditolak dan H_0 diterima). Demikian menunjukkan bahwa kualitas kinerja aparatur pemerintah memiliki nilai kemungkinan lebih fokus pada sebuah pelaporan kinerja serta keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tersebut.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang memiliki hasil serupa oleh (Erinos & Hendri, 2020), (Tegor et al., 2021) namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari F, 2022), (Anaan, 2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, sumber daya manusia, sistem informasi

akuntansi merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *Good Governance*, dan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), *good governance*, dan kualitas kinerja aparatur pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan serta meningkatkan suatu instansi, dibutuhkan prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan. Prinsip tersebut biasa disebut dengan *Good Governance*. *Good Governance* sangat wajib untuk diimplementasikan dalam instansi pemerintahan di Indonesia, karena dengan adanya *good governance* yang tertanam dalam diri aparatur pemerintahan akan mampu mengelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Namun selain *Good Governance* yang menjadi pengaruh terhadap laporan keuangan, kualitas kinerja juga menjadi pokok penyebab sebuah timbulnya kualitas sebuah laporan keuangan yang benar sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kualitas kinerja dari aparatur pemerintahan sangat penting untuk ditingkatkan dan dijaga keprofesionalitasnya dalam memenuhi tanggungjawab serta tugasnya. Aparatur pemerintahan mempunyai peran yang amat penting, karena aparatur pemerintah menjadi pemeran atau pelaku yang membangun terciptanya sebuah kualitas laporan keuangan yang baik dan benar, dan yang harus menerapkan pedoman serta prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan *Good Governance* dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian dikarenakan penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik dapat membentuk sebuah laporan keuangan yang andal, relevan, dapat mudah untuk dipahami, serta tepat waktu. *Good governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Demikian dikarenakan *good governance* menjadi salah satu prinsip yang memiliki peranan penting untuk menciptakan sebuah penerapan tata Kelola pemerintah yang baik, hal tersebut akan terwujud jika adanya dukungan dari prinsip yang bersifat membangkitkan sebuah kepercayaan. Kepercayaan tersebut berupa partisipasi, adanya penegakan hukum, transparansi, responsive, kesetaraan serta keadilan dan akuntabilitas. Kualitas kinerja aparatur pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian dikarenakan bahwa kualitas kinerja aparatur pemerintah memiliki nilai kemungkinan lebih fokus pada sebuah pelaporan kinerja serta keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tersebut. Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), *good governance*, dan kualitas kinerja aparatur pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Cirebon. Menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik, *good governance* yang tercipta, dan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang

berkualitas. Terkesinambungan dari ketiga variabel independent tersebut dapat menciptakan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hamid, M. et al. (2020) Media Pembelajaran. Edited by T. Limbong. Yayasan kita menulis.
- Aditya, R., Priambadha, M. A., Abimanyu, A., & Ardiansyah, R. (2024). Journal of Social and Economics Research Implementation Of Accrual – Based Government Accounting Standards (Sap) On The Quality Of Presentation Of Government. 6(1), 174–194.
- Ardianti, E. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Gunungkidul). Jurnal Ekobis Dewantara, 1(2), 54–69.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawantahun 2018. <https://journal.uir.ac.id>, 6(1), 1. <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/5292/2559>
- Budiyanto. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Good Governance, Pengendalian Intern Dan Penggunaan Teknologi Komputer Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6–25.
- Dri Asmawanti S, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita, In. O. W. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation, Vol. 5, 85–94.
- Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, & Ratmono, D. (2015). Analisis Multivariate dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan menggunakan EViews 10. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). Desain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2022). manajemen Keuangan Sektor Publik Edisi 2.
- Harun, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh), 1(1), 83–99. <https://doi.org/10.52046/jssh.v1i1.737>.
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. El Muhasaba Jurnal Akuntansi, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan. Hospitality, 11(1), 281–290.

- Ismail Nurdin, dan Hartanti, Sri. (2019). Metodologi Penelitian sosial. Surabaya : Media Sahabat Cendikia.
- Jauhari, H., Sari, Y., & Dewata, E. (2019). Implementation of Good Governance, Utilization of Information Technology, And Reliability of Government Financial Statements. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 117–126. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i2.59>
- Jundia, H. S., Sarwono, A. E., & Astuti, D. S. P. (2023). Analisis Peningkatkan Kualitas Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 259–267. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1530>
- Khasanah Uswatun, & Nilasari Ayunda Putri. (2023). Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 279–288. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Komite SAP. (2021). Ramadh. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 71, 160–173. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Kurniawati, A., & Sadeli, D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Brainy: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis Mahasiswa*, 2(2), 18–24
- Lahur, S. I. L., Simamora, L., & Diarsyad, M. I. (2022). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Di Kabupaten Barito Utara). *Jemba : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 2(2), 72–80. <https://doi.org/10.52300/Jembar.V2i2.7128>
- Luh, N., Tiya, W., Nyoman, N., Rahayu, S., & Dewi, T. (2020). Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 11(2), 170–178.
- Maisyaroh, R., & Haryanto. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penerapan Good Governance and Clean Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–10.
- Mia, O., Raharjo, K., & Andini, R. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Journal of Accounting Of Accounting*, 2(2), 2–15
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>.
- Nasution, K. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nofianti, L. (2023). Kajian Terhadap Pengukuran Governance (Indikator Dan Prinsip Governance). *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 1–30. http://repository.uin-suska.ac.id/16860/1/paper_kajian_governance.pdf
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40 <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov> Halaman 40

- Patty, M. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Pemediasi. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(1), 66–82. E-ISSN 2686 5661
- Pramesti AP, n.d. (2020) Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. *Manajemen Bisnis Jurnal Magister Manajemen*, Vol.3 No.1.
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah , Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ” (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1389–1407.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Seminar Nasional Taman Siswa Bima*, 1(1), 147–153.
- Ratnasari, D., Sastrodiharjo, I., & Rely, G. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Organisasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(3), 332–358. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i3.43>
- RIDHO, P. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung). *UIN Raden Intan Lampung*
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Safitri Nur Ramadhani, Mahsuni Wahid Abdul, J. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima, NTB). *E-Jurnal Riset Akuntansi*, 09(02), 120–131.
- Sari, E. K., & U.B, A. R. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tambak Rejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelayanan E-Ktp. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 674–688. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.621>.
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1), 27–42. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Sari, R. P., Rice Haryati, & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 183–192. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.852>. Sengkey, C., Sabijono, H., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F.,

- Ratulangi, U. S., & Unsrat, J. K. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of The Application of Fixed Assets Accounting At The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 441–450.
- Setiono, E. P. (2019). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung). Universitas Komputer Indonesia.
- Siregar, A. Y., & Sudiartri, S. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 60–68. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1237>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantif Kualitatif R & D. In Universitas Nusantara PGRI Kediri (Vol. 01).
- Sugiyono, (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)
- Sujarweni, V. Wiratna. (2022). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprihatin, N. S., & Ananthy, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242–252.
- Supriyanto, A. S., & Ekowati, V. M. (2019). Riset manajemen SDM untuk skripsi, tesis, disertasi, dan dilengkapi dengan contoh artikel rurnal. *Inteligensia Media*.
- Tanjung, A. H. (2022). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Aktual Untuk SKPD*.
- Tegor, T., Juliza, Yusmalina, Y., & Haqiqi, F. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun). *Jurnal Cafeteria*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.276>
- Uli, N., Trivena, & Suwandi. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Semangat Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Cv. Piranti Makmur Bandar Lampung. 25–35. <http://repo.darmajaya.ac.id/12112/>.
- Widaningrum, V. D., & Fahrhani, F. Z. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2425–2435.
- Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197>.
- Wing Wahyu Winarno. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Pencetakan.
- Wiratama, I. G. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Opd (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 296–307.

- Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(1), 60–67.
- Wulandari, C., & Efendi, D. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6).
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Yudi, Y., & Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 1–19.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).